

sedikit, kritik utk ilmu sosial kita ..

oleh Akhmad Ramdhon*

Dalam sebuah bukunya Mahbub ul Haq menulis *The Poverty Curtain*, Columbia University Press, 1976 memaparkan tentang realitas kehidupan masyarakat Dunia Ketiga, yang penuh dengan bekapan kemiskinan. Kemiskinan yang terdesain oleh sebuah kesadaran semu, yang terbungkus oleh sebuah tatanan baru selepas Perang Dunia II berakhir¹. Seakan-akan lupa dengan cacatan masa lampau tentang kesedihan manusia, orde pembangunan tegak diatas penindasan terhadap kemiskinan warganya, tegak kuasa diatas keterkungkungan dunia pers dan tegak ditopang militer sebagai eksekutor atas kebutuhan pelegallan tindakan pemerintah. Negara yang semestinya bertanggung jawab atas kebutuhan warga, kemudian menjadi pihak yang pertama kali mengkreasi kemiskinan menjadi sebuah situasi kolektif. Dengan menempatkan pertumbuhan pembangunan sebagai motor perubahan, semua instrumen negara menjadi pelaku terdepan untuk membungkam teriakan penderitaan yang terlalu banyak, untuk kemudian digantikan dengan angka-angka stabilitas gerak pembangunan. Pembangunan kemudian menjadi jargon kolektif bangsa ini, mengalahkan cerita-cerita kecil tentang kemiskinan, menenggelamkan kabar ketidakadilan dan mengajarkan kemajuan yang akan tercapai oleh bangsa ini kepada anak-anak kita agar mereka bangga tentang bangsa yang sedang membangun ini.

Mungkin itulah salah alasan kenapa kemudian Yayasan Obor Indonesia (sebagai salah satu motor penerbitan yang mempublikasikan naskah-naskah krititentang negara) menterjemahkannya dengan mengambil judul *Tirai Kemiskinan : Tantangan-tantangan untuk Dunia Ketiga*². Namun, masih relevankah semua itu ? Buku yang diterjemahkan pada era Pembangunan yang masih jaya pada saat itu adalah upaya menggugah kesadaran kita sebagai bangsa untuk mau belajar dan berubah, bahwa pembangunan (*developmentalism*) yang mengabaikan kolektifitas kebutuhan bangsa ini hanya akan menjadikan bangsa ini

¹ Sebuah tatanan dunia global pasca PD II, yang diawali dengan pertemuan pada Juli 1944 yang diikuti 730 delegasi dari 44 negara untuk mengambil kesepakatan Bretton Woods Agreement tentang penataan Eropa pasca kehancuran. Dari sinilah, desain dunia global dilaunching, untuk kemudian disusul dengan pembuatan instrumen-instrumen global (WorldBank, IBRD, IMF dll) untuk melakukan regulasi ekonomi politik internasional dan melahirkan berbagai bentuk program *transnational policy* yang termanifestasikan dalam beberapa paket (: yang paling kontemporer adalah WTO) kebijakan yang didesakkan ke berbagai negara.

² Mahbub ul Haq, *Tirai Kemiskinan Tantangan-tantangan untuk Dunia Ketiga*, Yayasan Obor Indonesia, 1983.

sebagai bangsa yang bangga oleh kisah-kisah indah³ yang dipaksakan diruang-ruang pendidikan.

Ternyata bangsa ini baru sadar akan keroposnya pondasi pembangunan oleh rezim Orde Baru setelah memasuki dekade tahapan pembangunan yang kelima. Bayangan akan tinggal landas kemudian tergantikan oleh krisis yang luar biasa, seluruh pondasi negara terguncang oleh perubahan tak terperikan. Rezim harus tergantikan lewat pengorbanan anak-anak bangsa yang membela hak-hak mereka, disintegrasi menjadi sebuah wacana kolektif bangsa, konflik horisontal lahir dimana-mana atas beragam alasan hingga kenyamanan hidup yang dulu pernah ada, kini berganti oleh ketakutan dan ketidakpercayaan satu sama lain.

Bangsa ini terseret oleh badai perubahan yang ada tanpa ada kemampuan untuk bertahan⁴. Sebenarnya apa yang salah dari semua itu ? Menjadi salah satu jawaban bagi pemikiran Mahbub ul Haq adalah terjadinya krisis dalam ilmu sosial yang kita pelajari⁵. Pengadaptasian ilmu sosial yang terjadi selama ini hanyalah didedikasikan untuk membangun legitimasi kekuasaan politik negara atas warganya. Terjadi diskriminasi dalam sebuah proses pembelajaran ilmu sosial yang ada, dimana akumulasi pemahaman yang mestinya beragam dalam pola pendekatan-nya terhadap realitas kemudian dimonopoli dan diekspansi kekuasaan terhadap ilmu pengetahuan yang sedang berkembang. Keberpihakan yang ada hanyalah bagian dari sebuah upaya pelestarian akan kekuasaan yang menghabiskan tenaganya untuk mengembar-gemborkan pembangunan sebagai jalan satu-satunya⁶.

Realitas ilmu sosial yang mengangkat nilai-nilai kemanusiaan kemudian tergantikan oleh penyeragaman pola pikir hingga ketakutan untuk berbeda. Perbedaan sebagai pondasi dasar dalam masyarakat kemudian harus dihilangkan dan konflik yang seharusnya ada, kemudian

³ Dalam sebuah buku, kisah kemajuan ekonomi di Asia ditunjukkan dalam beragam angka-angka penuh harapan. Lihat Kenichi Ohmae, *The End of Nation State, The Rise of Regional Economics*, HarperCollins Publishers 1995.

⁴ Krisis ekonomi yang melanda bangsa ini, masih terasakan sampai sekarang. Beragam dampak dari kebijakan ekonomi (pasca IMF) adalah kenaikan BBM, setelah sebelumnya ada penangguhan pembayaran hutang (moratorium) oleh Paris Club sebesar US \$ 2,6 miliar dari total utang US \$ 48 miliar (dimana utang pokok dan bunga-nya akan dicicil mulai akhir 2006) sehingga defisit APBN bisa mengecil 0,9 - 1% dari 1,3 %.

⁵ Oleh Ignas Kleden *Kritik Teori Sebagai Masalah Sosial*, dalam *Krisis Ilmu Sosial dalam Pembangunan di Dunia Ketiga*, hal. 139-154 PLP2M, 1984. Krisis ini berawal dari ketiadaan kritik empiris, dimana kebanyakan penelitian lapangan yang dimiliki oleh banyak ilmuwan sosial tak bermuara pada realitas yang ada dan situasi ini tak terpisahkan oleh sebab epistemologi ilmu yang digunakan yaitu pendekatan struktural, yang menjadi kritik kedua bagi ilmu sosial di Indonesia.

⁶ Dengan mengambil pola yang sama, nalar ekonomi kita kemudian mengadopsi berbagai pola yang dikembangkan di dunia (: dengan Amerika sebagai propogandis). Pendekatan pemikir klasik seperti Smith dengan *vent for surplus* teorinya, Ricardian dengan model pertumbuhan dan *comparative advantage*-nya, Malthus dengan populasinya hingga Rostow yang membuat jenjang kemajuan (*stages theory*) memonopoli pola pengembangan Dunia Ketiga. Ozay Mehmet, *Westernizing The Third World, The Eurocentricity of Economic Development Theories*, Routledge 1999.

dipendam dalam-dalam. Kita tak pernah mengenal perbedaan dalam ruang-ruang kebudayaan yang ada, kita terkungkung oleh kebutuhan stabilitas sehingga regulasi kepentingan setiap orang sebagai bagian dari proses demokratisasi, tak terjadi. Sejarah masa lalu bangsa ini yang sangat dinamis, kemudian berganti dengan stabilitas masyarakat yang terciptakan oleh pengawasan aparat negara (militer). Penjelasan (ilmu sosial) terhadap relitas-pun mengalami kegagalan sehingga kita kesulitan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Oleh sebab berjaraknya ilmu sosial yang ada dengan kenyataan yang terus bergerak secara dinamis sehingga beragam masalah yang menjadi beban bangsa ini, tak terselesaikan oleh kontribusi ilmuwan sosial. Maka menjadi penting, ketika ilmu sosial mulai mengadaptasi berbagai hal berkaitan dengan penjelasan atas perubahan yang terjadi. Kesadaran akan kebutuhan memaknai demokrasi, memahami relitas masyarakat secara intens serta tak berjarak, membangun kesadaran serta memberdayakan masyarakat atau mengkritisi kebijakan negara atas ketidakberpihakannya terhadap publik, menjadi sebuah kebutuhan yang tak terbendung seiring dengan laju perubahan global⁷, yang mau tak mau ilmu sosial mesti merespon-nya. Beragam penjelasan terhadap realitas yang baru akan menjadi sebuah dasar dalam merespon perubahan itu sendiri⁸. Dan disitulah kemudian ilmu sosial menemukan ruang *axiology*-nya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari realitas kehidupan masyarakat dan ilmuwan sosial menemukan eksistensinya sebagai cendekiawan⁹. Ilmuwan sosial kemudian mengambil peran untuk memfasilitasi masyarakat (publik) dalam relasinya dengan negara, dimana negara cenderung mengabaikan peran dan kebutuhan warganya. Dalam rentang perubahan yang sangat deras, intervensi ilmuwan sosial mesti mampu membangun inisiasi masyarakat sehingga berdaya bila berhadapan dengan negara yang makin tak bersahabat¹⁰. Masyarakat yang berdaya menjadi sebuah tujuan dari proses demokratisasi dalam alam negara yang modern, dimana masyarakat sadar akan kebutuhannya, paham akan berbagai sebaran informasi dan mampu mengambil inisiatif

⁷ James lee Ray, *Global Politics*, tentang problematika global yang meliputi arah perubahan global seiringan dengan perkembangan para pelaku globalisasi, dimana transnational organizations menjadi sebuah manifestasi kekuasaan yang menggeser peran negara. Houghton Mifflin Company, Hal 462-481, 1998.

⁸ Ketika ilmu sosial melakukan upaya merekonstruksi masa lalu kemudian memprediksikannya kedepan sebagai upaya pendekatan makro tentang realitas sebab penjelasan yang mengabaikan genealogi masyarakat hanya akan menghasilkan kegagalan pada analisisnya. Lihat Stehen K Sandersons, *Macrosociology*, Harper Collins Publishers Inc, 1991.

⁹ Ali Shariati, *Man and Islam*, University of Mashhad Press, 1982. Bahwa ada tanggung jawab lebih dari seseorang yang berpengetahuan ketimbang yang tidak dan dalam fakta yang terjadi di revolusi di Iran adalah besarnya peran kaum cendekiawan dalam mendorong laju perubahan dan perlawanan terhadap rezim Shah.

¹⁰ Diskursus tentang peran negara terhadap kehidupan masyarakat, mulai memasuki fase baru orientasi negara yang modern, dimana negara harusnya mampu mengadaptasi pola perubahan masyarakat yang makin berdaya (civil society). Christopher Pierson, *The Modern State*, Routledge, hal 64-69, 1996.

dalam memperjuangkan hak-haknya. Identitas masyarakat yang mandiri, terbangun oleh melebarnya ruang-ruang pengetahuan yang telah diinvestasikan oleh ilmuwan sosial. Keberdayaan masyarakat akan berujung pada orientasi kebijakan negara yang memihak kebutuhan masyarakat secara luas dan disinilah bingkai dari peran ilmuwan sosial, menemukan kejelasannya.

Sebenarnya tafsir atas realitas tersebut, telah tertuang dalam desain yang terdapat di makna keagamaan kita yaitu kebutuhan untuk menegakkan tatanan masyarakat yang etis dan egalitarian serta berkeadilan¹¹. Dengan pola pendekatan ekonomi-politik sebagai sebuah hipotesa, relasi antara negara dan masyarakat dikaji secara kritis sehingga beragam pola pendekatan keilmuan yang ada, mesti jelas keberpihakkannya. Dalam banyak kasus, kajian yang memihak pada kebutuhan lokalitas masyarakat dan mengembangkan budaya baru terlalu minim bila harus berbanding dengan dominasi wacana strukturalis, dengan segala turunan pendekatannya¹². Dengan pendekatan sosiologis yang menempatkan masyarakat sebagai subyek, maka kebutuhan secara metodologis untuk mengawali sebuah pendekatan baru dalam ilmu sosial yang ada segera dimulai. Problematika empiris yang menempatkan realitas masyarakat sebagai variabel yang terabaikan pada catatan masa lalu perkembangan ilmu sosial di Indonesia, mulai tergantikan. Yang terbangun adalah perwakilan kaum terdidik untuk belajar didalam proses kehidupan masyarakat, memahami, berdekatan, bersama-sama menikmati proses dan bersama-sama membangun kesadaran. Sebuah kesadaran sebagai individu yang independen ataupun kesadarannya sebagai warga negara yang mempunyai seperangkat hak dan kewajiban, dalam relasinya dengan individu-individu yang lain, dalam bingkai masyarakat yang demokratik.

* **Penulis** : belajar dan mengajar sosiologi di univ. sebelas maret

¹¹ Fazlur Rahman, *Major Themes of The Qur'an*, Minniapolis, hal 55, 1980.

¹² Roger Joseph dalam Abubaker A. Bagader edt, *Islam and Sociological Perspektif*, MYM Malaysia, hal 67-78, 1983.